ASURANSI KREDIT PERDAGANGAN SEBAGAI SALAH SATU PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI DANA TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR DALAM TRANSAKSI LPBBTI

**Aprillita Putri[[1]](#footnote-0)**\***, Gavriel Faliera Lase[[2]](#footnote-1)\*, dan Nugra Okto[[3]](#footnote-2)\***

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

***Abstract***

*This article aims to review the legal relationship between the parties, peer-to-peer lending schemes in Indonesia, and legal protection for lenders. The method used is normative legal research by literature studies through statutory regulations, such as regulations related to Information Technology-Based Joint Financing Services. in the form of Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 ON Information Technology Based Collective Financing Services. Then, empirical legal research methods by taking examples of default cases on the Investree marketplace, articles, and statistical data. In facts, the public as users often do not understand how the peer-to-peer lending platform works, causing conflict between users and marketplace as a provider. Therefore, users need to have sufficient knowledge in order to be able to transact comfortably. Besides, users also need to understand legal protection in the event of default so that there is legal certainty for lenders.*

***Keywords***: *peer-to-peer, default, legal protection*

**Intisari**

Artikel ini mengulas hubungan hukum antara pemberi dana dan penerima dana, skema *peer to peer lending* di Indonesia, dan perlindungan hukum bagi pemberi dana. Metode yang digunakan berupa penelitian hukum normatif dengan cara studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, seperti regulasi terkait Layanan Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengambil contoh kasus gagal bayar pada *marketplace* Investree, artikel, dan data statistik. Faktanya, masyarakat sebagai pengguna seringkali tidak memahami cara kerja *platform* *peer to peer lending* sehingga menyebabkan konflik antara pengguna dan penyelenggara. Oleh karena itu, pengguna perlu memiliki pengetahuan yang cukup agar dapat bertransaksi dengan nyaman. Selain itu, pengguna juga perlu memahami perlindungan hukum jika terjadi gagal bayar agar terdapat kepastian hukum bagi pemberi dana.

**Kata Kunci**: *peer to peer lending*, gagal bayar, perlindungan hukum

1. **Pendahuluan**
2. **Latar Belakang**

Maraknya perkembangan teknologi elektronik di era digital semakin dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama sejak adanya pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global sejak 11 Maret 2020.[[4]](#footnote-3) Dalam rangka memerangi COVID-19, pemerintah mengeluarkan surat edaran sebagai pedoman bagi masyarakat untuk *Work From Home* (WFH), yakni bekerja dari tempat tinggalnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menerapkan *lockdown* guna mengendalikan persebaran COVID-19. Dua kebijakan tersebut mengakibatkan berbagai pelaku usaha gulung tikar dan harus mengatur strategi demi mencari keuntungan, salah satunya upaya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) meminjam dana kepada lembaga keuangan untuk modal usahanya. Oleh karena itu, pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* memberikan kelonggaran dan kemudahan kredit kepada debitur yang terkena dampak dari pandemi COVID-19.[[5]](#footnote-4) Peraturan tersebut juga menjelaskan secara detail terkait kebijakan kredit yang diberikan bagi debitur yang berpotensi mengalami gagal bayar. Akan tetapi, dasar hukum tersebut menyebabkan *moral hazard* bagi debitur yang sehat secara finansial, tetapi beritikad buruk untuk tidak membayar utangnya dan tidak kooperatif. Faktanya, sebagian besar debitur yang mengajukan kredit di bank bukanlah sektor UMKM. Pada tahun 2021, OJK mencatat bahwa perbankan hanya mendanai kredit sebesar 19,88% untuk debitur UMKM, sedangkan 80,02% kredit disalurkan kepada non-UMKM.[[6]](#footnote-5) Peraturan yang penerapannya masih sulit bagi UMKM dan hanya berlaku sampai tanggal 31 Maret 2021 tersebut membuat para UMKM mencari alternatif pinjaman lain melalui akses internet pada ponsel mereka.

Transformasi digital dalam arus bisnis digital Indonesia mendorong lahirnya *financial technology* (*fintech*) yang ditandai dengan terbentuknya Asosiasi Fintech Indonesia secara sah sebagai badan hukum sejak tahun 2016.[[7]](#footnote-6) Salah satu bentuk pendanaan digital yang sedang marak saat ini adalah *Fintech Peer to Peer Lending* (*Fintech P2P*). Ekosistem *fintech* di Indonesia didominasi oleh model bisnis *P2P Lending*, yakni sebesar 40% dari keseluruhan industri *fintech* di Indonesia yang berjumlah lebih dari delapan industri.[[8]](#footnote-7) Penyaluran *P2P Lending* kepada penerima pinjaman per Juni 2023 telah mencapai nominal Rp640 triliun. Angka tersebut meningkat 60% dari Juni tahun sebelumnya.[[9]](#footnote-8) Total dana yang naik secara signifikan tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai pelaku usaha selaku penerima dana yang membutuhkan dana untuk kelangsungan usahanya. Faktor utama kelompok UMKM memilih *P2P* *Lending* adalah karena mereka tergolong dalam kelompok *unbanked* sehingga sulit atau bahkan tidak bisa mendapatkan akses layanan perbankan.[[10]](#footnote-9) Konsep *P2P* *Lending* yang lebih dikenal dengan istilah “pinjaman *online*” seakan-akan menjadi solusi bagi UMKM yang kesulitan mencari modal usaha. Maka dari itu, langkah OJK untuk mengatur skema *P2P* *Lending* sudah tepat melalui Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Namun, berdasarkan data OJK, TWP90 Indonesia per Juni 2023 menurun dibandingkan bulan sebelumnya. TWP90 sendiri adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian pendanaan di atas sembilan puluh hari sejak tanggal jatuh tempo. Pada Mei lalu, kredit macet mencapai 3,36%. Akan tetapi, capaian dua bulan tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan periode Januari hingga April 2023 yang di bawah 3%. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak kasus gagal bayar yang melebihi sembilan puluh hari sehingga hak dari pemberi dana tidak terpenuhi. Sebagai contoh, Investree dikabarkan gagal bayar kepada peminjam dana hingga ratusan hari. Tidak hanya itu, Investree pernah dikabarkan belum memenuhi komitmennya, yaitu jika terjadi telat bayar lebih dari sembilan puluh hari akan dikategorikan sebagai *Non Performing Loan* dan akan diproses pencairan dana.[[11]](#footnote-10) Di sisi lain, pihak penyelenggara tidak dapat mengembalikan dana ke pemberi dana karena penerima dana tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana sehingga pemberi dana dirugikan. Oleh karena itu, pihak pemberi dana dan penerima dana perlu mempelajari terlebih dahulu bagaimana skema *P2P Lending* sehingga dapat mencegah kerugian dari masing-masing pihak.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa diperlukan peningkatan literasi finansial masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2022, OJK mencatat bahwa tingkat literasi finansial masyarakat Indonesia sebesar 49,68%[[12]](#footnote-11). Literasi finansial diukur dengan menggunakan lima indikator, yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku dalam pengelolaan, serta pengambilan keputusan keuangan. Jika dibagi ke dalam sektor-sektor jasa keuangan, literasi finansial di bidang *fintech* jauh lebih rendah. Tingkat literasi finansial di sektor *fintech* hanya 10,90%.[[13]](#footnote-12) Tingkat literasi finansial di bidang *fintech* adalah tingkat literasi finansial terendah setelah pasar modal. Survei dari OJK ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat kepada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *P2P Lending* masih sangat rendah. Kurangnya pemahaman tentang cara kerja *P2P Lending* membuat posisi penerima dana menjadi rentan karena akan terus-menerus ditagih dan, pada akhirnya, merugikan pemberi dana yang tidak mendapatkan kembali dana yang dipinjamkannya. Oleh karena itu, perlu peningkatan literasi keuangan masyarakat, khususnya di bidang *fintech*, salah satunya dengan mengenal lebih dalam perihal cara kerja asuransi kredit perdagangan yang menjamin dana *lender*.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana pengaturan dan cara kerja transaksi *P2P Lending* di Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi dana terhadap risiko gagal bayar dalam *P2P Lending* di Indonesia?
4. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman *lender* mengenai asuransi kredit perdagangan dalam transaksi *P2P Lending* di Indonesia?
5. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka menjawab rumusan masalah dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan cara studi kepustakaan (*library research*) melalui peraturan perundang-undangan dan kontrak (bahan hukum primer). Kemudian, untuk menyajikan jawaban mengenai bagaimana hukum senyatanya berlaku, digunakan metode penelitian hukum empiris dengan cara mengakses artikel dan data statistik mengenai topik penulisan (bahan hukum sekunder).

**B. Pembahasan**

1. **Pengaturan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di Indonesia dan Cara Kerja *P2P Lending* di Indonesia**

**1.1 Definisi dan para pihak dalam LPBBTI**

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.[[14]](#footnote-13) Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa setidaknya ada tiga pihak yang berperan penting dalam LPBBTI. Ketiga pihak tersebut adalah penyelenggara LPBBTI, pemberi dana, dan penerima dana. Penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.[[15]](#footnote-14) Kemudian, pemberi dana adalah perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan pendanaan.[[16]](#footnote-15) Dalam Pasal 27 ayat (2) POJK 10/POJK.05/2022 dinyatakan bahwa pemberi dana terdiri atas warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, badan hukum asing, badan usaha Indonesia, badan usaha asing, dan/atau lembaga internasional.[[17]](#footnote-16) Kemudian, penerima dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima pendanaan.[[18]](#footnote-17) Penerima dana harus berdomisili di Indonesia,[[19]](#footnote-18) yang terdiri atas warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan/atau badan usaha Indonesia.[[20]](#footnote-19) Selain ketiga pihak tersebut, ada satu pihak lagi yang turut berperan dalam sistem LPBBTI, yaitu bank. Peran pihak bank dalam LPBBTI adalah bahwa dalam melaksanakan LPBBTI, penyelenggara harus menggunakan *virtual account* dan *escrow account*. *Virtual account* adalah nomor yang mengidentifikasi suatu pengguna dan digunakan untuk mengidentifikasi rekening tertentu, sedangkan *escrow account* adalah rekening bank atas nama penyelenggara yang berfungsi untuk penitipan dan pengeluaran dana. Penggunaan kedua jenis akun tersebut dilakukan dengan diadakannya kerjasama antara bank dan penyelenggara LPBBTI.[[21]](#footnote-20)

**1.2 Hubungan Hukum Para Pihak Dalam LPBBTI**

POJK 10/POJK.05/2022 (POJK 10) tidak menjelaskan secara eksplisit hubungan hukum di antara para pihak. Pasal 30 POJK 10 menyatakan bahwa perjanjian yang terjadi dalam LPBBTI paling sedikit hanya antara penyelenggara LPBBTI dan pemberi dana serta antara pemberi dana dan penerima dana. Pasal ini tidak menjelaskan hubungan antara penyelenggara dengan penerima dana.[[22]](#footnote-21) Padahal, dalam praktiknya, penerima dana berhubungan langsung dengan penyelenggara, bukan penerima dana.[[23]](#footnote-22) Hal ini penting untuk diketahui karena akan berpengaruh kepada pertanggungjawaban ketika terjadi gagal bayar. Maka, perlu diketahui hubungan hukum di antara para pihak.

1. **Hubungan hukum antara penyelenggara dan pemberi dana**

Dalam LPBBTI, pemberi dana melakukan perjanjian kuasa dengan penyelenggara LPBBTI. Pemberi dana memberikan kuasa kepada penyelenggara sehingga penyelenggara bertindak untuk dan atas nama pemberi dana.[[24]](#footnote-23) Apabila terjadi kerugian kepada penerima dana yang diakibatkan oleh pelaksanaan kuasa penyelenggara, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks LPBBTI, pemberi dana memberi kuasa kepada penyelenggara untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam dengan penerima dana. Dana yang diserahkan oleh pemberi dana bukanlah untuk dimiliki oleh penyelenggara, tapi hanya untuk diteruskan kepada penerima dana.[[25]](#footnote-24)  
 Sebagai penerima kuasa, penyelenggara wajib melakukan upaya untuk mencegah kerugian pada pemberi dana. Salah satu upaya pencegahan tersebut adalah dengan melakukan mitigasi risiko. Kewajiban penyelenggara melaksanakan mitigasi risiko menjadi alas hak bagi pemberi dana untuk menggugat penyelenggara apabila penyelenggara lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penerima kuasa. Oleh karena itu, ketika pemberi dana menggugat penyelenggara dengan dasar wanprestasi, pemberi dana bukan menggugat atas dasar uang yang dipinjamkan dan tidak dibayar oleh penerima dana, tetapi karena penyelenggara tidak melakukan kewajibannya, yaitu tidak melakukan mitigasi risiko secara optimal.

Penyelenggara juga tidak secara langsung menanggung risiko gagal bayar oleh penerima dana kepada pemberi dana.[[26]](#footnote-25) Penyelenggara hanya bertindak sebagai kuasa sehingga kerugian yang dialami oleh pemberi dana ditanggung oleh pemberi dana itu sendiri. Oleh sebab itu, penyelenggara tidak dapat memberikan jaminan bahwa keuntungan dari pendanaan akan didapatkan oleh pemberi dana.

1. **Hubungan hukum antara penyelenggara dan penerima dana**

Penyelenggara dan penerima dana melakukan perjanjian pinjam-meminjam. Akan tetapi, penerima dana tidak meminjam dana dari penyelenggara. Dana yang didapat dari penerima dana adalah dari pemberi dana. Penyelenggara hanya bertindak dalam kapasitas sebagai kuasa dari pemberi dana. Hubungan hukum ini semakin jelas terlihat setelah dicabutnya POJK nomor 77/POJK.01/2016 dengan POJK 10. Dalam POJK 77/POJK.01/2016 (selanjutnya disebut POJK 77), perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi tidak jelas. POJK 77 hanya mendefinisikan bahwa penerima pinjaman memiliki utang. Namun, tidak disebutkan dengan siapa pihak penerima pinjaman memiliki utang.[[27]](#footnote-26) POJK 10 lebih tegas dalam menggambarkan hubungan hukum antara penyelenggara dan penerima pinjaman. Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan bahwa penyelenggara merupakan pihak yang menerima kuasa dari pemberi dana untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam, tetapi secara implisit dapat diketahui bahwa penyelenggara hanya merupakan kuasa dari pemberi dana. POJK 10 mendefinisikan pendanaan sebagai penyaluran dana dari pemberi dana ke penerima dana dengan kontraprestasi berupa pengembalian dana sesuai waktu yang ditentukan. Dari definisi tersebut, jelas bahwa penerima dana berutang kepada pemberi dana, sedangkan penerima dana tidak bertemu langsung dengan pemberi dana, melainkan dengan penyelenggara, yang artinya jelas bahwa penyelenggara hanya berperan sebagai kuasa dari pemberi dana.

1. **Hubungan Hukum Antara Pemberi Dana dan Penerima Dana**

Seperti yang telah disebutkan, salah satu perjanjian yang terjadi dalam POJK 10 adalah perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana. Namun, istilah yang digunakan bukan perjanjian pinjam-meminjam, melainkan pendanaan. Perjanjian pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana ini tidaklah sama dengan perjanjian pinjam-meminjam di dalam KUH Perdata. Dalam LPBBTI, pemberi dana dan penerima dana tidak bertemu secara langsung. Pemberi dana melakukan perjanjian pinjam-meminjam lewat penyelenggara sebagai kuasa. Selain itu, perjanjian pinjam-meminjam ini secara spesifik terjadi lewat media teknologi informasi, maka hubungan yang sebenarnya terjadi di antara pemberi dana dan penerima dana adalah perjanjian pinjam-meminjam dengan kuasa melalui media teknologi informasi.

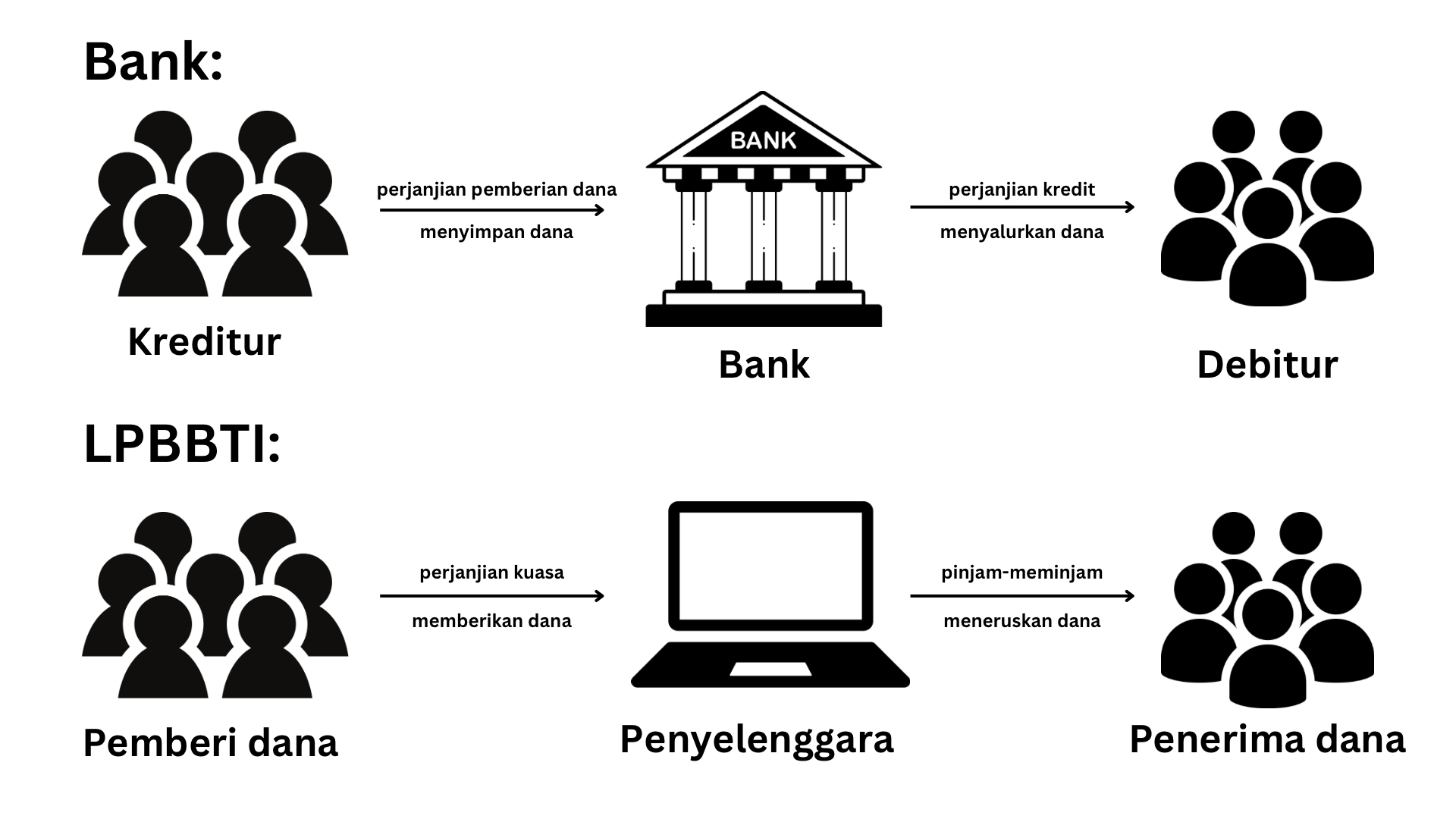
**1.3 Pengaturan LPBBTI di Indonesia**

Ada banyak peraturan terkait yang bersinggungan dengan LPBBTI. Namun, pengaturan tentang LPBBTI paling utama dapat ditemukan pada POJK 10 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. POJK ini lebih banyak mengatur tentang aspek perusahaan dari LPBBTI. POJK 10 berisi ketentuan-ketentuan mengenai kelembagaan penyelenggara LPBBTI, bentuk badan hukum, kepemilikan, permodalan, kegiatan usaha, izin usaha, sistem elektronik penyelenggara LPBBTI, dan lain-lain. Selain POJK 10, peraturan lain yang juga mengatur tentang LPBBTI adalah POJK Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, POJK Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

POJK 10 mencabut POJK 77 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau LPMUBTI. Terdapat beberapa perubahan dalam POJK 10. Istilah yang digunakan dalam POJK 10 adalah LPBBTI. Perubahan istilah pinjam meminjam menjadi pendanaan merupakan akibat dari definisi LPBBTI yang telah memasukkan prinsip konvensional atau syariah sebagai prinsip dasar usaha. Dengan dimasukkannya kedua prinsip tersebut, istilah yang digunakan harus bersifat inklusif. Istilah pinjam-meminjam tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga digunakan istilah pendanaan.[[28]](#footnote-27) Perubahan lain yang terdapat dalam POJK 10 adalah bentuk badan penyelenggara LPBBTI yang pada POJK 77 dapat berbentuk perusahaan terbatas (PT) atau koperasi menjadi wajib berbentuk PT.[[29]](#footnote-28) Selain itu, POJK 10 mewajibkan penyelenggara LPBBTI menjadi anggota asosiasi serta tunduk pada aturan asosiasi tersebut dan penyelenggara LPBBTI harus mendapat izin dari OJK sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.[[30]](#footnote-29)

**1.4 Persamaan Konsep Kredit Perbankan dengan *Peer to Peer (P2P) Lending***

Pada dasarnya, berbagai aturan yang diterbitkan oleh OJK mengenai LPBBTI, mulai dari POJK 77 sampai dengan POJK 10 selalu mengikuti konsep dasar dari salah satu produk pinjaman perbankan, yakni kredit usaha. Kredit usaha merupakan penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha, dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu serta pembayaran bunga dan biaya lainnya,[[31]](#footnote-30) sedangkan, menurut Pasal 1 angka 3 POJK 10, definisi pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI. Menurut kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa di sini pihak penyelenggara dalam transaksi LPBBTI sama dengan pihak bank dalam transaksi kredit usaha, di mana mereka menjadi perantara antara debitur dan kreditur. Pada proses pengelolaan dana, bank akan mengelola uang yang disimpan oleh masyarakat sebagai dana yang akan dipinjamkan kepada debitur. Hal tersebut juga berlaku pada transaksi LPBBTI, di mana penyelenggara akan menyalurkan uang yang diberikan oleh pemberi dana/kreditur sebagai dana yang akan dipinjamkan kepada penerima dana/debitur (UMKM). Kedua *platform* untuk mempertemukan kreditur dan debitur, baik bank konvensional maupun penyelenggara LPBBTI, tidak mengadakan perjanjian secara langsung antara kreditur dan debitur. Dalam hal ini, penyelenggara dalam transaksi LPBBTI dapat dianggap sebagai bank karena memiliki kemampuan pinjam meminjam secara digital. Berikut gambar hubungan hukum keduanya untuk dapat memahami konsep tersebut lebih lanjut.



Selain persamaan konsep dasar, persamaan lainnya yakni pihak kreditur di bank dan pemberi dana di transaksi P2P juga dikenakan biaya administrasi bulanan untuk meningkatkan performa bank maupun aplikasi dalam transaksi P2P dan adanya manajemen risiko oleh penyelenggara P2P dengan nama *Innovative Credit Scoring* (*ICS*) yang mirip dengan prinsip *Know Your Customer* (*KYC*) di bank. Mengenai mitigasi risiko akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan perlindungan hukum.

**1.5** **Perbedaan Kredit Perbankan dengan Transaksi *Peer to Peer Lending***

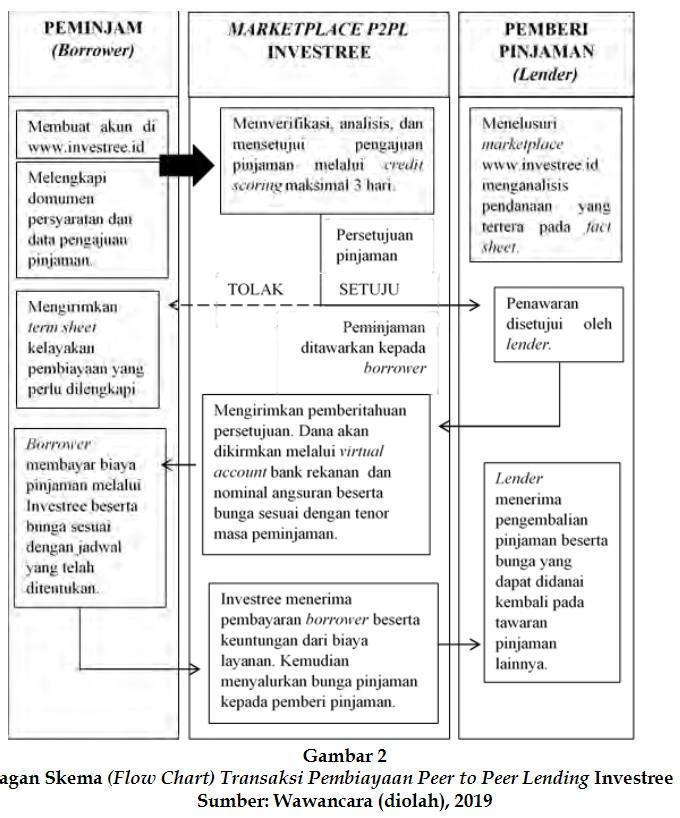
Pada subbab pertama dijelaskan mengenai persamaan konsep dasar perbankan dengan *peer to peer (P2P) lending*. Namun, tetap terdapat perbedaan antara keduanya dalam perkembangan. Berikut adalah tabel perbedaan antara keduanya dari perspektif lender.

| Faktor pembeda | Transaksi Kredit Bank | Transaksi Kredit P2P |
| --- | --- | --- |
| Dasar hukum | Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). | Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 |
| Proses | Kreditur akan menyalurkan uangnya ke bank, kemudian bank akan langsung menyalurkan uang tersebut kepada debitur (tanpa perantara). | Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi pemberi dana. Pemberi dana akan menyalurkan uangnya kepada penyelenggara dengan melibatkan bank melalui *escrow account* dan *virtual account*. Setelah itu, pihak penyelenggara akan meneruskan kepada *virtual account* lender melalui bank. |
| Imbal hasil | Bunga tabungan dan deposito yang sudah ditentukan dari awal. | Bunga pinjaman berdasarkan tingkat risiko (A+, A, B, C, C-) dan pengembalian. |
| Penjamin | Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) | Asuransi Kredit oleh masing-masing institusi |
| Jangka waktu | Tabungan bisa ditarik kapan saja, sedangkan deposito ada jangka waktu tertentu untuk menarik dana. | Pendanaan sesuai jangka waktu yang telah disepakati sejak awal. |

Selain perbedaan di atas, konstruksi hubungan hukum antara para pihak juga berbeda. Penyelenggara *P2P lending* bukanlah perbankan yang menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana dari masyarakat penyimpan dana dan menyalurkannya ke masyarakat melalui perjanjian kredit/pembiayaan. Penyelenggara *P2P lending* adalah *marketplace* atau perusahaan teknologi finansial yang memang mempertemukan orang dengan kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya. Jika merujuk pada Pasal 1 angka 1 POJK 10, dijelaskan lebih lanjut bahwa pendanaan dilakukan baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Hal tersebut perlu diketahui agar *P2P lending* tidak berujung pada penyelenggaraan bank gelap (*shadow banking*).[[32]](#footnote-31)

**1.6** **Cara Kerja Transaksi *P2P* pada praktiknya**

Sejak Mei 2023, khalayak publik ramai membicarakan salah satu *platform* penyelenggara *P2P Lending*, yakni Investree. Khalayak publik, terutama pemberi dana, terus menerus menulis perihal isu penerima dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam dari pemberi dana hingga ratusan hari. Terjadi kesalahpahaman antara pemberi dana dengan Investree selaku penyelenggara. Para pemberi dana terus menerus menanyakan kepastian terkait keterlambatan pembayaran yang terjadi hingga ratusan hari. Mereka juga meminta pihak Investree untuk mengklaim asuransi.[[33]](#footnote-32) Padahal, sejatinya pemberi dana perlu mengetahui dan mempelajari secara jelas cara kerja transaksi *P2P Lending*. Untuk mengetahui secara lebih mudah, berikut skema cara kerja transaksi *P2P* pada Investree selaku salah satu *platform* penyelenggara.

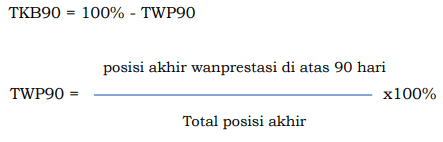


Dari skema tersebut, perlu diketahui, bahwa, jika *lender* telah menyetujui peminjaman dana oleh *borrower*, maka *lender* wajib mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan oleh *marketplace*. Awalnya, setiap *marketplace* akan menyeleksi *borrower* menggunakan bantuan penyelenggara *Innovative Credit Scoring* (*ICS*) yang bekerjasama dengan *marketplace*. Sampai dengan Mei 2023, terdapat sembilan belas penyelenggara *ICS* di Indonesia yang membantu *lender* dalam memperkirakan kapasitas dan kemauan *borrower* untuk mengembalikan pinjaman.[[34]](#footnote-33) *ICS* menilai kelayakan kredit nasabah dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau *AI*) dengan kapasitas yang berbeda-beda antar sembilan belas penyelenggara yang ada. Setelah itu, hasil dari *ICS* akan diterima oleh *marketplace*. *Marketplace* akan memilih *borrower* yang layak untuk diberi pendanaan usaha. Setelah itu, identitas *borrower* berupa nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan ditampilkan dengan profil usaha dan keterangan keperluan pendanaan. *Lender* yang mendaftar berhak memilih siapa *borrower* yang akan didanai. Setelah itu, *lender* akan memberi dana melalui *escrow account* milik *marketplace* untuk diteruskan oleh bank atas perintah *marketplace* ke *virtual account* milik *borrower*. Selanjutnya, *borrower* akan melakukan usaha dengan pinjaman dana yang telah diterima, kemudian *borrower* diwajibkan untuk mengembalikan dana beserta tambahan bunga melalui *virtual account* sesuai waktu yang telah disepakati. Perlu diingat, gagal bayar merupakan risiko bisnis. Untuk menanggulangi hal tersebut, *marketplace* akan bekerja sama dengan perusahaan asuransi dan membeli asuransi kredit. Nantinya, jika *borrower* gagal bayar, perusahaan asuransi kredit akan menanggung hal tersebut dengan subrogasi sebanyak 80% dari total dana yang dipinjam.

Setelah mengetahui skema cara kerja *P2P Lending*, terdapat dua hal yang juga penting untuk diketahui oleh *lender* terutama jika terjadi gagal bayar oleh *borrower.*

**1.7 Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB) 90**

Sesuai dengan penjelasan Pasal 101 huruf d POJK 10, TKB90 adalah ukuran tingkat keberhasilan penyelenggara LPBBTI (termasuk Investree) dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pendanaan dalam jangka waktu sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuh tempo. Berikut cara menghitung TKB90 berikut:



TWP90 merupakan ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian pendanaan di atas sembilan puluh hari sejak tanggal jatuh tempo.

Terkait isu gagal bayar yang sedang marak, Adrian Gunadi selaku *Co-Founder* dan *CEO* Investree menjelaskan TKB90 Investree per 30 April 2023 sebesar 97,07% di atas rata-rata industri per Maret sebesar 95,7%.[[35]](#footnote-34) Hal tersebut menunjukkan bahwa Investree terus memperbarui laporan pengaduan dan penyelesaian pendanaan *lender* kepada OJK selaku regulator sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Tentunya angka tersebut juga penting untuk diketahui lender bahwa dana yang dipinjamkan masih tergolong aman.

**1.8 Tata cara klaim asuransi**

Asuransi kredit yang dimiliki oleh Investree tidak bisa diklaim begitu saja karena jangka waktu klaim sudah disepakati sejak awal oleh Investree dan perusahaan asuransi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal tersebut berarti jika *borrower* telat membayar, terdapat penagihan secara eksternal dan internal secara bertahap bulan per bulan. Jangka waktu kedua penagihan tersebut memerlukan waktu kurang lebih dua belas bulan. Oleh karena itu, *lender* tidak bisa memaksa *marketplace* untuk langsung mengklaim asuransi kredit begitu saja. Jika *lender* sudah memahami secara jelas kedua hal di atas, *lender* tentu akan paham bahwa ketika terjadi gagal bayar oleh *borrower*, *lender* akan menerima dana kembali sebanyak 80% dari yang dipinjamkan.

1. **Perlindungan Hukum bagi Pemberi Dana terhadap Risiko Gagal Bayar dalam *Peer to Peer Lending* di Indonesia**

Dalam praktiknya, kegiatan *peer to peer lending* memiliki banyak permasalahan, sehingga dibutuhkan perlindungan hukum bagi pemberi dana. Perlindungan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah atau penyelenggara melalui sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa hingga di lembaga peradilan.[[36]](#footnote-35)

**2.1 Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dapat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam upaya melindungi pemberi dana pemerintah telah mengeluarkan POJK 10 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi. Dalam POJK ini telah diatur mengenai hak-hak dari pemberi dana dan perlindungan terhadap pemberi dana dengan adanya kewajiban penyelenggara untuk mempunyai prosedur keamanan untuk gangguan, kegagalan dan kerugian. Dalam Pasal 35 POJK 10 tersebut diatur mengenai manajemen risiko sehingga penyelenggara wajib melakukan mitigasi risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh penyelenggara paling sedikit memfasilitasi:

1. Melakukan analisis risiko pendanaan yang dilakukan oleh penyelenggara;
2. Melakukan verifikasi identitas pengguna dan keaslian dokumen;
3. Melakukan penagihan atas pendanaan yang disalurkan secara optimal;
4. Memfasilitasi pengalihan risiko pendanaan; dan
5. Memfasilitasi pengalihan risiko atas objek jaminan, jika ada.

Untuk membantu dalam melakukan kewajibannya, penyelenggara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti kerja sama melakukan *credit scoring,* pengelolaan dana, dan pengalihan risiko. Selain itu, dalam melakukan kewajibannya penyelenggara wajib menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penanganan pengaduan. Mitigasi risiko yang dapat menjadi perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai berikut:

1. **Mitigasi Risiko Credit Scoring**

Dalam melakukan mitigasi risiko *credit scoring,* penyelenggara wajib melakukan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pemberi dana. Dalam melakukan *credit scoring,* penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sehingga dapat lebih memastikan kelayakan dari penerima dana. Dalam melakukan *credit scoring,* penyelenggara dapat menerapkan 5C, yaitu *character, capacity, capital, condition,* dan *collateral*.[[37]](#footnote-36) Dalam pasal 23 POJK 6/POJK.07/2022, penyelenggara wajib mengklasifikasi calon konsumen dengan pertimbangan, yaitu:

1. Latar belakang calon konsumen;
2. Pekerjaan calon konsumen;
3. Keuangan calon konsumen;
4. Maksud dan tujuan menggunakan produk layanan penyelenggara; dan
5. Informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi calon konsumen.

Oleh karena itu, baik penyelenggara maupun pihak ketiga yang melakukan *credit scoring* harus melakukan dengan baik agar dana dari pemberi dana dapat dikembalikan. Selain itu, dari sisi penerima dana dapat mengembalikan dana pinjaman tersebut sehingga masing-masing pihak tidak mengalami kerugian.

1. **Pengelolaan Dana**

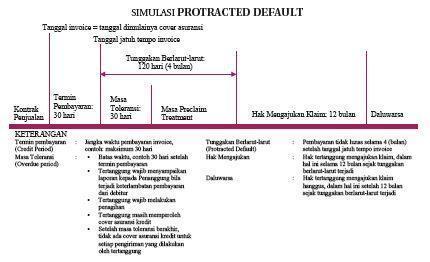
Dalam melakukan pengelolaan dana, penyelenggara bekerja sama dengan bank dan wajib memiliki *escrow account*. *Escrow account* adalah rekening giro di bank atas nama penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada pengguna, sedangkan bagi pengguna penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* atau *gateway account*. Pengelola dana dalam *escrow account* adalah agen dari bank tersebut sehingga penyelenggara tidak memegang dana dari pemberi dana secara langsung sehingga keamanan dana pinjaman dapat lebih terjamin.

1. **Pengalihan Risiko**

Dalam melakukan pengalihan risiko, penyelenggara wajib menjalin kerja sama dengan perusahaan asuransi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 35 POJK 10 sehingga jika penyelenggara tidak membeli produk asuransi maka akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut berupa peringatan tertulis, pembatasan izin usaha, atau pencabutan izin. Selain itu, sanksi administrasi tersebut dapat disertai dengan pemblokiran sistem elektronik penyelenggara. Objek yang akan diasuransikan dalam asuransi adalah dana pinjam meminjam antara pemberi dana dan penerima dana melalui penyelenggara. Produk asuransi yang digunakan adalah asuransi jiwa kredit dengan skema anjak piutang. Asuransi jiwa kredit adalah produk asuransi yang memberikan manfaat berupa pelunasan kepada bank apabila seseorang memanfaatkan fasilitas kredit meninggal dunia,[[38]](#footnote-37) sedangkan anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri maupun transaksi perdagangan luar negeri.

Ketika penerima dana melakukan transaksi pinjam meminjam dengan penyelenggara, transaksi tersebut diasuransikan oleh penyelenggara dengan objek jaminan berupa *surety bond*. Konsep *surety bond* adalah non-kolateral karena berada dalam lingkup asuransi sebagai penerima resiko dari tertanggung dan hal ini merupakan salah satu cara perusahaan asuransi mengurangi beban risiko apabila tertanggung wanprestasi.[[39]](#footnote-38) Dalam konsep nonkolateral, teknis pelaksanaan *surety bond* mewajibkan adanya perjanjian ganti rugi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip *indemnity* asuransi, yaitu prinsip yang mengatur mengenai pemberian ganti rugi. Akibatnya, terjadi pengalihan kewajiban penagihan (subrogasi) dari pihak penyelenggara kepada perusahaan asuransi sehingga perusahaan asuransi yang akan melakukan penagihan ke penerima dana untuk mendapatkan ganti rugi.

Pasal 6 ayat (2) PMK No. 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship* menyatakan bahwa penetapan tarif imbal jasa harus mencakup unsur tarif risiko, biaya administrasi, dan umum, biaya akuisisi, dan keuntungan, sedangkan ayat (4) menyatakan bahwa unsur biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) paling tinggi sebesar 20%. Apabila diinterpretasikan secara *a contrario,* maka klaim yang dapat dicairkan hanya sebesar 80% dan 20% sisanya akan menjadi biaya tarif imbal jasa bagi perusahaan asuransi. Hal tersebut terimplementasi dalam *coinsurance percentage*, yaitu polis asuransi kredit perdagangan mensyaratkan adanya porsi dari setiap *loss* yang menjadi beban tertanggung berkisar antara 10 s.d. 20%.[[40]](#footnote-39) Namun, sebelum melakukan klaim asuransi terdapat aturan terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu.



**(Reinfokus edisi II, tahun 2012)**

Berdasarkan gambar tersebut terdapat beberapa mekanisme sebelum dapat melakukan klaim asuransi.[[41]](#footnote-40) Setelah masa termin pembayaran lewat, maka terdapat masa toleransi selama tiga puluh hari dan masa *pre-claim treatment* selama sembilan puluh hari sehingga totalnya menjadi 120 hari (tunggakan berlarut-larut). Setelah melewati jangka waktu 120 hari, tertanggung memiliki hak mengajukan klaim dengan jangka waktu dua belas bulan sejak tunggakan berlarut-larut terjadi dan hak tertanggung mengajukan klaim setelah dua belas bulan sejak tunggakan berlarut-larut terjadi. Penerapannya dapat dilihat dari kasus Investree yang dikabarkan gagal bayar kepada peminjam dana hingga ratusan hari. Pihak Investree mengatakan bahwa ada ketentuan dari pihak asuransi sehingga belum dapat diajukan klaim. Selain itu, jumlah pengembalian dari pihak asuransi maksimal adalah 90% dari pokok pinjaman berdasarkan premi yang telah Investree bayarkan, tidak termasuk bunga dan denda keterlambatan. Pernyataan dari Investree sudah benar karena pihak penyelenggara tidak dapat melakukan klaim sembarang waktu. Terdapat mekanisme dan SOP yang harus dipatuhi terlebih dahulu.

**2.2** **Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan berupa penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Namun, sebelum melakukan proses penyelesaian sengketa, pemberi dana mempunyai hak untuk melakukan pengaduan terlebih dahulu kepada pihak penyelenggara. Pengaturan tentang ketentuan pengaduan diatur dalam pasal 14 POJK No. 18/POJK.07/2018:

1. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan objektif; dan
2. Melakukan analisis untuk kebenaran aduan.

Penyelenggara wajib menyelesaikan pengaduan yang dilakukan secara lisan dalam jangka waktu lima hari kerja, sedangkan pengaduan yang dilakukan secara tertulis wajib diselesaikan dalam jangka waktu dua puluh hari kerja. Setelah melakukan pengaduan, penyelenggara dapat memberikan tanggapan berupa penjelasan permasalahan dan penyelesaian permasalahan. Setelah itu, penyelenggara wajib memberi waktu bagi pemberi dana untuk menyetujui atau menolak tanggapan dari pengaduan. Apabila pemberi dana menolak tanggapan dari penyelenggara, maka pemberi dana dapat mengajukan penyelesaian pengaduan melalui lembaga peradilan atau lembaga nonperadilan tergantung pada persetujuan dari kedua belah pihak, tetapi dalam perkembangannya muncul asuransi kredit perdagangan sebagai salah satu langkah penyelesaian sengketa.

Apabila digunakan nonperadilan, maka penyelesaian yang ditempuh dapat maka penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui jalur nonperadilan mempunyai keuntungan memakan waktu lebih singkat. OJK telah mengeluarkan POJK No. 1/ POJK.07-2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, terbit pula Keputusan OJK nomor Kep-01/D.07/2016 yang di dalamnya berisi pengesahan terhadap terbentuknya enam lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yakni LAPSPI, BAPMI, BMAI, BAMPPI, BMPPI, dan BMDP. Pelaksanaan peraturan tersebut belum terlaksana dengan baik sehingga memerlukan adanya ketentuan yang tepat dikarenakan ketentuan yang telah dikeluarkan belum memadai.[[42]](#footnote-41) Syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat diselesaikan melalui Lembaga APS haruslah merupakan penyelesaian persengketaan perdata yang muncul antara pihak-pihak berhubungan dengan aktivitas di sektor industri jasa keuangan, adanya kata sepakat antara para pihak yang memiliki sengketa jika sengketa akan diselesaikan dengan perantara Lembaga APS yang berkaitan, adanya permohonan tertulis dari pihak yang memiliki sengketa pada Lembaga APS, bahwa sengketa itu bukanlah perkara pidana, sengketa tersebut tidak terkait pelanggaran administratif melainkan sengketa perdata.[[43]](#footnote-42)

Selain melalui nonperadilan, penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh adalah melalui lembaga peradilan. Skema transaksi dalam *peer-to-peer lending* merupakan hubungan privat antara para pihak yang menghasilkan perjanjian sehingga dapat terjadi sengketa keperdataan. Ketika terjadi sengketa perdata para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk menggelar sidang penyelesaian perkara tersebut. Dalam penjelasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengembalian dana kepada pemberi dana melalui skema asuransi kredit perdagangan sebesar 80% sehingga gugatan yang diajukan bukan bertujuan untuk mengembalikan dana, melainkan untuk melaporkan pihak penyelenggara jika terjadi sengketa gagal bayar.

Dalam POJK 10, penyelenggara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pengalihan risiko. Akan tetapi, apabila penyelenggara tidak memfasilitasi pengalihan risiko melalui pembelian premi asuransi kredit perdagangan maka hal ini dapat disebut sebagai kelalaian oleh pihak penyelenggara. Dalam perkara ini, pihak yang dirugikan, yaitu pemberi dana, dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap pihak penyelenggara akibat dari kelalaiannya. Wanprestasi diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

1. **Cara Meningkatkan Pemahaman *Lender* Mengenai Asuransi Kredit Perdagangan dalam Transaksi *P2P Lending* di Indonesia**

**3.1 Edukasi oleh OJK dan Perusahaan Asuransi**

Peranan asuransi sangat penting dalam transaksi di berbagai bidang karena fungsi asuransi adalah *risk transfer mechanism,*[[44]](#footnote-43) di mana risiko akan ditanggung oleh pihak asuransi, terutama apabila *borrower* gagal bayar atau melakukan wanprestasi. Hal tersebut harus menjadi dasar pemikiran para *lender* dalam meminjamkan uangnya, agar tidak perlu khawatir mengalami kerugian sebesar 100% jika *borrower* gagal bayar.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas keuangan (terutama *borrower* dan *lender*), OJK harus menerapkan Pasal 9 POJK Nomor 6/ POJK.07/2022, yakni wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat yang dilakukan sebagai program tahunan. Hal tersebut diterapkan dengan membuktikkan komitmen untuk terus melaksanakan program edukasi keuangan termasuk perihal asuransi secara masif, baik secara tatap muka (*offline*) maupun daring (*online*) melalui *Learning Management System* (LMS) dan media sosial.[[45]](#footnote-44) Edukasi keuangan juga dapat dilakukan dengan mengajak perusahaan asuransi kredit, seperti mengadakan *talkshow* bersama serta rangkaian kegiatan literasi lainnya. Kemudian, perusahaan asuransi dapat mengadakan sosialisasi dan *coaching* sekaligus untuk membangun jejaring bisnis di berbagai *event*, termasuk di kalangan institusi pendidikan, seperti kampus.

**3.2 Buku Panduan Perihal Asuransi oleh Penyelenggara**

Penyelenggara P2P juga wajib memberikan perlindungan terhadap dana yang dipinjamkan sehingga memberikan keamanan terhadap *lender* dapat meminjamkan dana dengan aman. Namun, kenyataannya, penyelenggara dan *lender* tidak bertemu secara langsung melainkan hanya melalui media elektronik. Proses penyelenggaraan P2P antara *lender* dan *borrower* akan terjadi ketika telah terjadi kesepakatan yang akan dituangkan dalam dokumen elektronik.[[46]](#footnote-45) Melalui mekanisme tersebut, tidak ada jaminan bahwa akan terdapat mekanisme perlindungan hukum bagi *lender* dalam dokumen elektronik tersebut. Oleh karena itu, seharusnya sebelum terjadi kesepakatan antara penyelenggara dan *lender* disediakan buku panduan terkait asuransi kredit perdagangan untuk melindungi dana yang dipinjamkan.

Mekanisme yang dapat dilakukan oleh penyelenggara adalah dengan memasukkan klausul asuransi dalam kesepakatan yang berbentuk dokumen elektronik. Kemudian dalam perjanjian tersebut diberikan lampiran yang berupa buku panduan asuransi kredit perdagangan sehingga sebelum terjadi kesepakatan lender dapat mengetahui perlindungan hukum yang akan didapatkan jika terjadi gagal bayar. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Permenkeu No.124/2008 yang menyebutkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap *lender* adalah dengan mewajibkan perusahaan mengeluarkan produk asuransi kredit untuk memberikan penggantian kerugian terhadap *lender* jika tidak mampunya, gagal atau tidak terpenuhinya kewajiban dari *borrower*. Oleh karena itu, mekanisme asuransi kredit perdagangan wajib dilakukan oleh penyelenggara sesuai peraturan yang ada.

Dalam PP No. 71 Tahun 2019 dinyatakan bahwa kontrak elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP tersebut, salah satu syarat kontrak elektronik adalah memuat ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi. Dengan begitu, maka perlu diatur ketentuan mengenai perlindungan terhadap dana *lender* jika terjadi gagal bayar oleh *borrower* melalui klausul asuransi beserta lampiran yang berisi panduan asuransi kredit perdagangan.

Dengan adanya mekanisme tersebut maka akan meningkatkan kesadaran *lender* terhadap perlindungan hukum terhadap dirinya. Kesadaran masyarakat dapat timbul karena beberapa faktor, salah satunya adalah kepentingan pribadi terjamin.[[47]](#footnote-46) Dalam perjanjian P2P, *lender* memiliki kepentingan pribadi sehingga *lender* akan membaca dan memahami aturan yang berlaku untuk melindungi kepentingannya. Ketika *lender* telah membaca mengenai panduan asuransi kredit perdagangan, *lender* dapat memahami dan menuntut haknya untuk diberikan.

Untuk menjamin terlaksananya mekanisme tersebut, dibutuhkanlah AFPI sebagai asosiasi fintech di Indonesia. Menurut Snorkel dan Wankel, sebuah organisasi dibutuhkan untuk memastikan sebuah organisasi sesuai di jalurnya.[[48]](#footnote-47) Dalam konteks ini, AFPI dibutuhkan untuk memastikan dan mengawasi penyelenggara sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tidak ada pelanggaran yang mengakibatkan kerugian terhadap *lender* dan *borrower.* AFPI memiliki kewajiban untuk memastikan mekanisme ini berjalan dengan baik untuk melindungi *lender* dalam mekanisme P2P. Efektivitas mekanisme tersebut juga menjadi tanggung jawab bagi AFPI. Efektivitas adalah keberhasilan yang dicapai dari sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya,[[49]](#footnote-48) yaitu melindungi *lender* dalam transaksi P2P.

**3.3 Penggunaan Media Sosial untuk Meningkatkan Kesadaran *Lender***

Sebagaimana telah dijelaskan, *P2P lending* memiliki mekanisme di mana *lender* tidak bertemu langsung dengan *borrower*, tetapi *lender* meminjamkan uangnya melalui perantara LPBBTI. Artinya, terdapat informasi yang asimetris antara LPBBTI, *lender*, dan *borrower*. Informasi yang asimetris adalah keadaan di mana salah satu pihak memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan pihak lain,[[50]](#footnote-49) dalam *P2P lending,* LPBBTImerupakan pihak dengan informasi yang lebih lengkap dibandingkan pihak lainnya. Untuk mengatasi masalah informasi yang asimetris tersebut, perlu ada pemerataan informasi. Selain lewat edukasi oleh OJK dan perusahaan asuransi serta buku panduan sebagaimana dijelaskan di atas, diperlukan upaya aktif masyarakat, khususnya *lender* untuk mencari informasi terkait *P2P lending*. Media sosial dapat menjadi salah satu alat pemerataan informasi. Media sosial menyediakan informasi yang begitu melimpah. *Lender*, sebagai salah satu pihak yang rentan dalam *P2P lending*, dapat menggunakan media sosial untuk menentukan layak atau tidak sesuatu dipercaya.[[51]](#footnote-50) Dalam konteks *P2P lending*, *lender* dapat memilih layak atau tidaknya suatu LPBBTI untuk digunakan jasanya. Riset terkait rekam jejak, cara kerja, dan asuransi yang menjamin pengembalian dana dalam suatu LPBBTI sangat penting untuk dilakukan *lender* agar *lender* benar-benar mengetahui risiko apa yang mungkin terjadi ketika meminjamkan dananya lewat LPBBTI.[[52]](#footnote-51)

Namun, *lender* harus berhati-hati dalam menerima informasi dari media sosial. Melimpahnya informasi di media sosial tidak paralel dengan penyaring informasi. Akibatnya, banyak berita dan informasi palsu yang tersebar di media sosial. Informasi palsu justru akan menyebabkan *lender* rugi. Pencarian informasi di media sosial harus dibarengi dengan sikap skeptis. Dengan bersikap skeptis, *lender* mendapatkan informasi yang benar dan cukup. Informasi yang benar dan cukup memberikan pengetahuan yang benar tentang LPBBTI dan pada akhirnya menimbulkan kesadaran serta kehati-hatian bagi *lender* dalam melakukan aktivitas peminjaman dana melalui LPBBTI.

**C. Penutup**

*Fintech* *P2P Lending* hadir sebagai solusi atas UMKM yang kesulitan untuk mengajukan kredit di bank konvensional. Namun, perlu diketahui bahwa:

1. LPBBTI diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, peraturan utama untuk melihat pengaturan tentang LPBBTI adalah POJK 10. Peraturan ini mencabut POJK 77. Terdapat beberapa perubahan dalam POJK 10, seperti digunakannya istilah LPBBTI dan pendanaan, penyelenggara LPBBTI wajib berbentuk PT, penyelenggara LPBBTI wajib tergabung ke dalam asosiasi serta mematuhi peraturan dari asosiasi, dan penyelenggara LPBBTI wajib memiliki izin terlebih dahulu.Hubungan hukum di antara para pihak juga menjadi lebih jelas dalam POJK 10. POJK ini menyatakan dengan lebih tegas bahwa hubungan pinjam-meminjam yang terjadi dalam LPBBTI adalah antara pemberi dana dengan penerima dana. Adapun penyelenggara hanya bertindak dalam kapasitas sebagai kuasa dari pemberi dana. Cara kerja transaksi dalam *P2P Lending* di Indonesia secara umum sama dengan pinjaman kredit usaha dalam bank konvensional. Namun, secara khusus *P2P Lending* memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi *borrower* dan *lender* untuk mengatur pendanaan. Selain itu, *marketplace P2P Lending* akan bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk menanggulangi risiko gagal bayar sebagai risiko bisnis.
2. Perlindungan hukum terhadap pemberi dana dalam *P2P Lending* di Indonesia telah diatur dalam POJK 10. Peraturan tersebut mencakup mitigasi risiko berupa *credit scoring*, pengelolaan dana, dan pengalihan risiko. Pengalihan risiko juga diatur dalam mekanisme baru berupa asuransi kredit perdagangan. Dalam POJK tersebut juga telah mengatur ketentuan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan dan lembaga non-peradilan. Dimana ketentuan lembaga non-peradilan diatur dalam POJK No. 1/ POJK.07-2014 dan ketentuan lembaga peradilan menggunakan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
3. Banyak *lender* yang belum mengetahui pentingnya asuransi kredit perdagangan yang bekerjasama dengan penyelenggara *P2P Lending* untuk mentransfer risiko jika terjadi gagal bayar oleh *borrower*. Oleh karena itu, edukasi terhadap *lender* perlu diadakan secara masif oleh pemerintah, dalam hal ini OJK, perusahaan asuransi itu sendiri, dan penyelenggara melalui berbagai program, buku panduan, dan media sosial.

**D.** **Bibliografi**

Ade Hari Siswanto, Karakteristik Perjanjian Surety Bond Dalam Lingkup Hukum Asuransi, *Lex Jurnalica* 13, No. 3, (Desember 2016)

Agus Priyonggojati, “Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer To Peer Lending” *Jurnal USM Law Review* 2, No.2 (2019)

Asosiasi Fintech Indonesia, *Handbook Fintech untuk Keuangan Pribadi* (Jakarta, Indonesia: Asosiasi Fintech Indonesia, 2019), 4, <https://fintech.id/storage/files/shares/Handbook/Handbook%20Fintech%20-%20Keuangan%20Pribadi%202021_03022021%20Interactive.pdf>

Basri, “WFH di Tengah Pandemi COVID-19,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses pada 25 Agustus 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1/baca-artikel/13177/WFH-di-Tengah-Pandemi-COVID-19.html>

Dewanto, Dedy. “Peran Intermediary Insurance dalam Penanganan Asuransi Kredit Perdagangan dan Asuransi Lainnya di PT. Patra Niaga”, Jurnal Abdimas (2022): 2.

Hadjon, Phillipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu 1987

Fahmi Irham dan Yovi Lavianti Hadi, Pengantar Manjemen Perkreditan. Bandung: Alfabeta, 2010

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan Pembuktian, Persidangan, Penyitaan Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2019

Harahap, Nurasiah dan Relly Anastasya Nasution. “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (Financial Technology) Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending). Jurnal Hukum Kaidah 20. No. 1 (2020): 63-82. https://doi.org/10.30743/jhk.v20i1.3260

Hartanto, Ratna dan Juliyani Purnama Ramli. “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending”. Jurnal Ius Quia Iustum 25. no. 2 (Mei 2018): 320-338. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>

Laucereno, Syike. “Heboh ‘Nasabah’ Investree Uangnya Belum Balik, Gagal Bayar?,” detikFinance, 23 Mei 2023, <https://finance.detik.com/fintech/d-6733938/heboh-nasabah-investree-uangnya-belum-balik-gagal-bayar>

Lubis, Meisya Andriani dan Mohaman Fajri Mekka Putra. “Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas”. Jurnal USM Law Review 5. No.1 (2022): 188-204, doi: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896>

Luh Sarini, “Pengaturan Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Peer To Peer Lending,” Jurnal Kertha Semaya, Vol.9 No.1 Tahun (2020)

Novis Asria, “ Asuransi Kredit Perdagangan (Bagian Kedua)” 14 Desember 2016 <https://indonesiare.co.id/id/article/asuransi-kredit-perdaganganbagian-kedua>

Ntwiga, Davis Bundi and Patrick Weke, “Consumer Lending Using Social media Data”, International Journal of Scientific Research and Innovataive Technology 3, (2), (February 2016):1-8

Ofir, Moran and Ido Tzang, "An Empirical View of Peer-to-Peer (P2P) Lending Platforms". Berkeley Business Law Journal 19. no. 1 (2022): 175-215, doi: https://doi.org/10.15779/Z38V11VM4D

Otoritas Jasa Keuangan. Buku Panduan Kerjasama BPR dengan Fintech Lending (Jakarta, Indonesia: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keauangan. 2021). 12. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Panduan-Kerjasama-Bank-Perkreditan-Rakyat-(BPR)-dengan-Lembaga-Layanan-Pinjam-Meminjam-Berbasis-Teknologi-Informasi/Buku%20-Panduan%20Kerjasama%20BPR%20dengan%20Fintech%20P2P%20Lending.pdf>

Otoritas Jasa Keuangan. “Infografis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022”. diakses pada 26 Agustus 2023. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Fintech Lending Periode Juni 2023,” diakses pada 25 Agustus 2023, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan, “Punya Pinjaman Tanpa Rasa Cemas? Asuransi Jiwa Kredit Jawabannya!” <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10387>

Otoritas Jasa Keuangan, “Stimulus OJK Terkait Restrukturisasi Kredit di Bank,” Kontak 157 OJK, diakses pada 24 Agustus 2023, <https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/Website/ArticleList/View/10001>.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang penerapan manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembada Jasa Keuangan Nonbank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Rahadiyan, Indri dan Sari, Alfhica Rezita, “Peluang dan Tantangan Implementasi Fintech Peer to Peer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia,” Jurnal Defendonesia 4, no. 1, (September 2019): 20.

Reinfokus edisi II, tahun 2012

Segara, Tirta. Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi (Jakarta, Indonesia: OJK, 2019), 112, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku%202%20-%20Perbankan.pdf>

Siaran Pers OJK Nomor 02/DHMS/OJK/I/2023.

Suryono, Ryan Randy, Indra Budi, dan Betty Purwandari, “Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia”, Heliyon 7, (2021):1-10

Suryono, Ryan Randy, Betty Purwandari, dan Indra Budi, “Peer to peer (P2P) lending problems and potential solutions: a systematic literature review”, Procedia Computer Science 161, (2019): 204-214

Talahaturusun, Jevan Andreas dan Kohardinata, Cliff, “Pengaruh Pinjaman Peer To Peer (P2P) Terhadap Kredit Perbankan untuk UMKM dan Non UMKM Saat Pandemi COVID-19,” Business and Accounting Education Journal 4, no. 1 (April 2023): 2, doi: 10.15294/baej.v4il.68223.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Usanti, Trisadini Prasastinah dan Nurwahjuni. “Precautionary Principles in information Technology-Based Joint Funding Services”. IUS POSITUM (Journal of Law Theory and Law Enforcement) 2, No. 2, (April 2023): 1-15. <https://doi.org/10.56943/jlte.v2i1.273>

Wijaya, Trissia. “Berkembangnya Sistem Innovative Credit Scoring di Indonesia: Menilai Risiko dan Tantangan Kebijakan,” Makalah Kebijakan no. 57 (Mei 2023): 9.

Yuspin, Wardah, Ita Fitriana, Arief Bduiono, Ata Fauzie, dan Alfan Dzikria Nurrachman. “Evaluating the Regulatory Scheme on Mitigation Default Risk through Insurance in Peer-to-Peer Lending”, WSEAS TRANSACTIONS on SYSTEMS 21 (31 Desember 2022):347-358. doi: 10.37394/23202.2022.21.38

1. \* Alamat korespondensi: [aprillita.putri0703@mail.ugm.ac.id](mailto:aprillita.putri0703@mail.ugm.ac.id) [↑](#footnote-ref-0)
2. \*\* Alamat korespondensi: [gavriel.faliera2703@mail.ugm.ac.id](mailto:gavriel.faliera2703@mail.ugm.ac.id) [↑](#footnote-ref-1)
3. \*\*\* Alamat korespondensi: [nugra.okto2703@mail.ugm.ac.id](mailto:nugra.okto2703@mail.ugm.ac.id) [↑](#footnote-ref-2)
4. Basri, “WFH di Tengah Pandemi COVID-19,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses pada 25 Agustus 2023, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1/baca-artikel/13177/WFH-di-Tengah-Pandemi-COVID-19.html [↑](#footnote-ref-3)
5. Otoritas Jasa Keuangan, “Stimulus OJK Terkait Restrukturisasi Kredit di Bank,” Kontak 157 OJK, diakses pada 24 Agustus 2023, https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/Website/ArticleList/View/10001. [↑](#footnote-ref-4)
6. Jevan Andreas Talahaturusun dan Cliff Kohardinata, “Pengaruh Pinjaman Peer To Peer (P2P) Terhadap Kredit Perbankan untuk UMKM dan Non UMKM Saat Pandemi COVID-19,” *Business and Accounting Education Journal* 4, no. 1 (April 2023): 2, doi: 10.15294/baej.v4il.68223. [↑](#footnote-ref-5)
7. Asosiasi Fintech Indonesia, *Handbook Fintech untuk Keuangan Pribadi* (Jakarta, Indonesia: Asosiasi Fintech Indonesia, 2019), 4, https://fintech.id/storage/files/shares/Handbook/Handbook%20Fintech%20-%20Keuangan%20Pribadi%202021\_03022021%20Interactive.pdf [↑](#footnote-ref-6)
8. Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Panduan Kerjasama BPR dengan Fintech Lending* (Jakarta, Indonesia: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keauangan. 2021). 12. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Panduan-Kerjasama-Bank-Perkreditan-Rakyat-(BPR)-dengan-Lembaga-Layanan-Pinjam-Meminjam-Berbasis-Teknologi-Informasi/Buku%20-Panduan%20Kerjasama%20BPR%20dengan%20Fintech%20P2P%20Lending.pdf [↑](#footnote-ref-7)
9. Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Fintech Lending Periode Juni 2023,” diakses pada 25 Agustus 2023, https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx. [↑](#footnote-ref-8)
10. Indi Rahadiyan dan Alfhica Rezita Sari, “Peluang dan Tantangan Implementasi Fintech Peer to Peer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Defendonesia* 4, no. 1, (September 2019): 20. [↑](#footnote-ref-9)
11. Syike Laucereno, “Heboh ‘Nasabah’ Investree Uangnya Belum Balik, Gagal Bayar?,” *detikFinance*, 23 Mei 2023, https://finance.detik.com/fintech/d-6733938/heboh-nasabah-investree-uangnya-belum-balik-gagal-bayar. [↑](#footnote-ref-10)
12. Otoritas Jasa Keuangan, “Infografis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022,” diakses pada 26 Agustus 2023, https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx [↑](#footnote-ref-11)
13. Otoritas Jasa Keuangan, Infografis Survei Literasi Keuangan 2022, [↑](#footnote-ref-12)
14. Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi [↑](#footnote-ref-13)
15. Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi [↑](#footnote-ref-14)
16. Pasal 1 angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pedetikndanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi [↑](#footnote-ref-15)
17. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi [↑](#footnote-ref-16)
18. Pasal 1 angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi [↑](#footnote-ref-17)
19. Pasal 28 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi [↑](#footnote-ref-18)
20. Pasal 28 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi [↑](#footnote-ref-19)
21. Meisya Andriani Lubis dan Mohaman Fajri Mekka Putra. “*Peer To Peer (P2P) Lending:* Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas”, *Jurnal USM Law Review* 5, No. 1, (2022): 194, doi: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896>  [↑](#footnote-ref-20)
22. Wardah Yuspin *et al*, “Evaluating the Regulatory Scheme on Mitigation Default Risk through Insurance in Peer-to-Peer Lending”, *WSEAS TRANSACTIONS on SYSTEMS* 21, (31 Desember 2022): 349, doi: 10.37394/23202.2022.21.38 [↑](#footnote-ref-21)
23. Moran Ofir; Ido Tzang, "An Empirical View of Peer-to-Peer (P2P) Lending Platforms," *Berkeley Business Law Journal* 19, no. 1 (2022): 182, doi: https://doi.org/10.15779/Z38V11VM4D [↑](#footnote-ref-22)
24. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan Pembuktian, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*, (Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2019), 3 [↑](#footnote-ref-23)
25. Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli , “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending”, *Jurnal Ius Quia Iustum* 25, no. 2, (Mei 2018): 332, doi: https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6 [↑](#footnote-ref-24)
26. Nurasiah Harahap dan Relly Anastasya Nasution, “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (Financial Technology) Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending), *Jurnal Hukum Kaidah* 20, No. 1, (2020): 76, doi: https://doi.org/10.30743/jhk.v20i1.3260 [↑](#footnote-ref-25)
27. Hartanto dan Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending”, 327 [↑](#footnote-ref-26)
28. Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, “Precautionary Principles in information Technology-Based Joint Funding Services”, *IUS POSITUM (Journal of Law Theory and Law Enforcement)* 2, No. 2, (April 2023): 7, doi: https://doi.org/10.56943/jlte.v2i1.273 [↑](#footnote-ref-27)
29. Usanti dan Nurwahjuni, “Precautionary Principles in”, 3 [↑](#footnote-ref-28)
30. Usanti dan Nurwahjuni, “Precautionary Principles in”, 3 [↑](#footnote-ref-29)
31. Tirta Segara, *Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tingg*i (Jakarta, Indonesia: OJK, 2019), 112, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku%202%20-%20Perbankan.pdf> [↑](#footnote-ref-30)
32. Hartanto Ramli , Hubungan Hukum Pihak Peer to Peer, 329 [↑](#footnote-ref-31)
33. Syike Laucereno, “Heboh Investree Gagal Bayar?,” *detikFinance*, 23 Mei 2023. [↑](#footnote-ref-32)
34. Dr. Trissia Wijaya, “Berkembangnya Sistem *Innovative Credit Scoring* di Indonesia: Menilai Risiko dan Tantangan Kebijakan,” *Makalah Kebijakan* no. 57 (Mei 2023): 9. [↑](#footnote-ref-33)
35. Laucereno, Investree Uangnya Belum Balik, Gagal Bayar? [↑](#footnote-ref-34)
36. Hadjon 1987:29 [↑](#footnote-ref-35)
37. Fahmi I, *“Manajemen Perkreditan”* Bandung. Alfabeta [↑](#footnote-ref-36)
38. OJK, “Punya Pinjaman Tanpa Rasa Cemas? Asuransi Jiwa Kredit Jawabannya!” diakses pada 26 Agustus 2023, https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10387 [↑](#footnote-ref-37)
39. Ade Hari Siswanto, “Karakteristik Perjanjian *Surety Bond* Dalam Lingkup Hukum Asuransi,” *Lex Jurnalica* 13, No. 3, (Desember 2016): 188 [↑](#footnote-ref-38)
40. Novis Asria, “ Asuransi Kredit Perdagangan (Bagian Kedua)” diakses pada tanggal 26 Agustus 2023, <https://indonesiare.co.id/id/article/asuransi-kredit-perdaganganbagian-kedua> [↑](#footnote-ref-39)
41. Reinfokus edisi II, tahun 2012 [↑](#footnote-ref-40)
42. Agus Priyonggojati, “Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer To Peer Lending” *Jurnal USM Law Review* 2, No.2 (2019); 173. [↑](#footnote-ref-41)
43. Luh Sarini, “Pengaturan Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Peer To Peer Lending,” Jurnal Kertha Semaya, Vol.9 No.1 Tahun (2020), 59 [↑](#footnote-ref-42)
44. Dedy Dewanto, “Peran Intermediary Insurance dalam Penanganan Asuransi Kredit Perdagangan dan Asuransi Lainnya di PT. Patra Niaga”, *Jurnal Abdimas* (2022): 2. [↑](#footnote-ref-43)
45. Siaran Pers OJK Nomor 02/DHMS/OJK/I/2023. [↑](#footnote-ref-44)
46. Agus Priyonggojati, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaran Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending*, Semarang: Jurnal USM Law Review Vol.2, 2019 [↑](#footnote-ref-45)
47. Digdani. K Tanty, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi,*  2012. hl. 39 [↑](#footnote-ref-46)
48. M. Riza, dkk, *Pengawasan terhadap Integritas Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,* Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI [↑](#footnote-ref-47)
49. D. Suhendri, *Efektivitas Kinerja Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota dalam mengelola Taman Kenanga Dusun Gemulo Kota Batu.* hlm 19. <https://eprints.umm.ac.id/35927/> diakses 03 November 2023 [↑](#footnote-ref-48)
50. Ryan Randy Suryono, Betty Purwandari, dan Indra Budi, “Peer to peer (P2P) lending problems and potential solutions: a systematic literature review”, *Procedia Computer Science*, 161(2019): 210 [↑](#footnote-ref-49)
51. Davis Bundi Ntwiga and Patrick Weke, “Consumer Lending Using Social media Data”, *International Journal of Scientific Research and Innovative Technology* 3 ,(2), (February 2016):4 [↑](#footnote-ref-50)
52. Ryan Randy Suryono, Indra Budi, dan Betty Purwandari, “Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia”, *Heliyon* 7, (2021):5 [↑](#footnote-ref-51)